

MENGATASI PUTUS SEKOLAH ANAK DAN KEKERASAN PSIKIS:

MEMPERKUAT KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN-ANAK DI KOTA BANDUNG

Junus J. Beliu | Yusinta N. Fina | Noveni M. Malle
Dosen Universitas Terbuka

DITUJUKAN KEPADA:

1. Pemerintah Daerah Kota Bandung
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung

EXECUTIVE SUMMARY

Meski Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bandung tercatat terendah di Jawa Barat, tiga celah struktural masih mengancam perlindungan kelompok rentan dan berisiko menggerus capaian agregat yang telah dicapai. Pertama, anak laki-laki mendominasi angka putus sekolah SD hingga 59% dari 122 kasus, mengindikasikan tekanan ekonomi keluarga dan risiko pekerja anak. Kedua, kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan paling dominan terhadap perempuan (44,38%) dan anak (38,04%), namun sifatnya yang abstrak membuatnya sulit dideteksi dan ditangani secara konsisten. Ketiga, meski partisipasi organisasi perempuan meningkat pesat, baru 33 dari 59 organisasi yang aktif dan kepemimpinan strategis masih didominasi laki-laki. Apabila tidak segera ditangani, ketiga masalah ini meningkatkan kerentanan anak putus sekolah menjadi pekerja anak, memperbesar dampak psikologis jangka panjang bagi korban-korban

kekerasan, dan itu menghambat tercapainya kesetaraan gender substantif dibalik capaian indeks agregat yang tampak baik. Policy brief ini merekomendasikan tiga langkah prioritas berbasis data BPS, LKPJ, LPPD, dan Laporan UPTD PPA: (1) sistem deteksi dini putus sekolah berbasis kelurahan yang menyasar keluarga rentan ekonomi; (2) perluasan layanan konseling psikososial di kecamatan prioritas untuk dapat menekan prevalensi kekerasan psikis; (3) program afirmasi kepemimpinan bagi organisasi perempuan yang saat ini belum aktif berpartisipasi. Ketiga langkah ini perlu didukung data terpadu lintas OPD sebagai instrumen pemantauan yang responsif gender, agar DP3APM Kota Bandung dapat mengubah capaian agregat yang sangat baik menjadi perlindungan nyata bagi kelompok paling rentan.

Kata Kunci: Ketimpangan Gender, Anak, Perempuan

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender bersifat multidimensi dan tidak selalu tercermin linear pada indeks agregat (Kertati & Wahyuningsih, 2026). Kota Bandung mencatat kemajuan signifikan dalam lima tahun terakhir: IKG turun dari 0,386 (2020) menjadi 0,185 (2025), jauh di bawah rata-rata Jawa Barat (0,434), dan rata-rata lama sekolah (RLS) tertinggi di provinsi. Seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung juga telah berstatus layak anak. Namun, sejumlah kajian mengingatkan bahwa perbaikan indeks agregat perlu diuji dengan indikator substantif, terutama pada kelompok yang secara historis rentan tertinggal: anak laki-laki putus sekolah, korban kekerasan psikis, dan perempuan dengan akses kepemimpinan terbatas.

PERMASALAHAN

Bagian ini akan menguraikan tiga celah struktural yang perlu menjadi perhatian DP3APM Kota Bandung, mencakup data, akar masalah, dan kesenjangan (gap) kebijakan yang selama ini belum terjawab.

Konteks: Capaian Agregat Kota Bandung

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	0,386	0,353	0,36	0,275	0,244
Jawa Barat	0,489	0,493	0,49	0,482	0,458
Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Tabel 1. Perbandingan IKG Kota Bandung dengan Jawa Barat dan Rata-rata Nasional.

Sumber: Diolah penulis dari BPS RI, 2025 dan LKPJ Kota Bandung 2025

Wilayah	RLS 2025		RLS 2024	
	L	P	L	P
Jawa Barat	9,46	8,81	9,19	8,55
Kota Bandung	11,61	11,12	11,43	10,78

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data BPS RI, 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Bandung tertinggi di Jawa Barat untuk kedua gender, dengan selisih antar-gender yang relatif sempit (0,49 tahun) dibandingkan tingkat provinsi (0,65 tahun). Capaian agregat ini positif, namun tidak menjamin bahwa kelompok rentan spesifik anak putus sekolah, korban kekerasan psikis, dan perempuan dengan akses kepemimpinan terbatas turut terlindungi.

1. Putus Sekolah Anak Usia Sekolah Dasar

Data tahun ajaran 2018/2019 mencatat terdapat 122 siswa SD di Kota Bandung mengalami putus sekolah, didominasi anak laki-laki, meskipun data anak perempuan juga relatif sama dan dapat kategorikan tinggi.

Meski data ini berasal dari periode sebelum terjadi pandemi, tren RLS 2023-2025 yang tinggi (Lihat Tabel 2) tidak menjamin keterjangkauan intervensi afirmatif bagi kelompok rentan spesifik, sehingga celah ini tetap relevan untuk dipantau.

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
Laki-laki	72	59,00%
Perempuan	50	41,00%
Total	122	100%

Tabel 3. Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2020.

Pola ini sama dengan temuan di Sulawesi Selatan bahwa anak laki-laki lebih rentan terserap sebagai pekerja anak akibat tekanan ekonomi keluarga (Idrus et al., 2025). Akan tetapi, akar penyebab spesifik di Kota Bandung belum terpetakan secara sistematis: apakah didorong oleh kemiskinan rumah tangga, ketergantungan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum menjangkau keluarga paling rentan, lemahnya koordinasi lintas OPD (Dinas Pendidikan, DP3APM, dan Dinas Sosial), atau norma budaya yang menomorduakan pendidikan anak laki-laki dari keluarga miskin. Kajian implementasi kebijakan penanganan anak putus sekolah di Kota Bandung mencatat bahwa efektivitasnya masih bergantung pada koordinasi komunikasi, kecukupan sumber daya, dan konsistensi disposisi birokrasi lintas dinas (Yudha, 2024).

“

Anak-anak yang seharusnya sekolah justru masuk ke dunia kerja, kemiskinan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan cita-cita kesetaraan yang lebih menyeluruh pun semakin jauh dari kenyataan. Diagram ini pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian masalah harus dari akar sistemik, bukan hanya cara menangani gejala yang tampak di permukaan.



Gambar 1. Analisis akar masalah (problem tree)

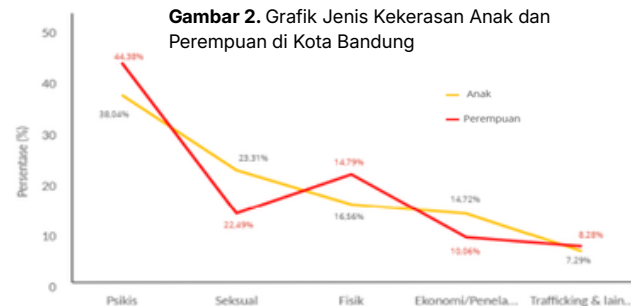
2. Kekerasan Psikis terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berfluktuasi sepanjang 2020-2025. Kekerasan terhadap perempuan memuncak pada 2022 (278 kasus) lalu menurun menjadi 218 kasus (2024) dan 122 kasus hingga Triwulan 3 2025; kekerasan terhadap anak memuncak pada 2024 (202 kasus) menjadi 120 kasus pada periode yang sama. Tren penurunan 2025 perlu dicermati hati-hati karena data baru mencakup tiga triwulan. Berdasarkan jenis kekerasan tahun 2025, kekerasan psikis paling dominan, baik terhadap anak (38,04%) maupun perempuan (44,38%), diikuti kekerasan seksual (23,31% pada anak) dan kekerasan fisik (22,49% pada perempuan).

Tahun	Anak Korban Kekerasan	Perempuan Korban Kekerasan
2020	138	161
2021	143	177
2022	142	278
2023	192	233
2024	202	218
2025 (Tw.3)	120	122

Tabel 4. Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Kota Bandung

Sumber: Laporan UPTD PPA, 2025



Kekerasan psikis bersifat tidak kasat mata dan sulit dideteksi secara konsisten (Martín-Fernández et al., 2019), sehingga rentan terhadap underreporting. Sistem pelaporan UPTD PPA saat ini belum terintegrasi dengan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga deteksi dini di tingkat komunitas masih lemah. Inilah gap kebijakan, bukan sekadar ketiadaan layanan konseling. Tren penurunan tahun 2025 juga memerlukan verifikasi data longitudinal sebelum disimpulkan sebagai perbaikan permanen (Ma et al., 2023).

3. Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Ruang Publik

Tingkat partisipasi organisasi perempuan meningkat pesat dari 16,95% (2019) menjadi 55,93% (2023), melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2020. Meski demikian, hingga 2023 baru 33 dari 59 organisasi perempuan yang aktif berpartisipasi, dan peningkatan partisipasi belum diikuti kepemimpinan substantif. Perempuan kerap masih terbatas pada peran simbolik di bidang kesejahteraan dan sosial, sementara kepemimpinan strategis dan perencanaan masih didominasi laki-laki (Amandaria et al., 2026). Gap kebijakan di sini adalah program pembinaan yang ada saat ini masih berorientasi pada perluasan keanggotaan, bukan penguatan kapasitas kepemimpinan struktural, sehingga belum cukup untuk bisa mendorong pemberdayaan politik perempuan secara lebih luas (Sundström et al., 2017). Tantangan serupa berlaku pada capaian Kelurahan Layak Anak (KLA), yang telah mencapai 100% di seluruh 151 kelurahan sesuai Perpres No. 25 Tahun 2021, namun idealnya disertai partisipasi bermakna anak dalam ruang, suara, audiens, dan pengaruh atas keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, bukan sekadar pemenuhan indikator administratif (Alias et al., 2023).

Tahun	Tingkat Partisipasi (%)	Tahun	Tingkat Partisipasi (%)
2020	30,5	2022	47,45
2021	38,98	2023	55,93

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Perempuan di Kota Bandung

Sumber: LKPJ Pemerintah Kota Bandung, 2025

ALTERNATIF SOLUSI

Enam alternatif berikut disusun untuk menjawab tiga masalah di atas, disertai penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan tingkat prioritas berdasarkan feasibilitas serta dampak langsungnya. Prioritas ditentukan berdasarkan feasibilitas, ketersediaan data dasar, dan juga dampak langsung terhadap tiga masalah inti. Alternatif 1, 2, dan 4 memperoleh prioritas tertinggi karena data dasar sudah tersedia (basis kelurahan dan UPTD PPA) sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun anggaran mendatang tanpa investasi infrastruktur data yang baru. Alternatif 6 (dashboard data terpadu) berperan sebagai fondasi pendukung ketiganya sehingga diberi prioritas sedang-tinggi, sedangkan alternatif 3 dan 5 bersifat pelengkap yang dapat menyusul pada tahun kedua setelah fondasi data dan program prioritas berjalan.

No	Alternatif Solusi & Penanggung Jawab	Prioritas	Indikator Keberhasilan
1	Deteksi dini & afirmasi pendidikan (DP3APM & Dinas Pendidikan)	Tinggi	Jumlah anak berisiko terdeteksi & tertangani per kelurahan
2	Penguatan layanan psikososial (UPTD PPA & Dinas Kesehatan)	Tinggi	Jumlah kasus tertangani; penurunan prevalensi kekerasan psikis
3	Integrasi sistem pelaporan kekerasan (Diskominfo & DP3APM)	Sedang	Waktu respons kasus; akurasi & kecepatan verifikasi data
4	Afirmasi kepemimpinan perempuan (DP3APM)	Tinggi	Jumlah organisasi aktif & pemimpin perempuan strategis baru
5	Monitoring keberlanjutan KLA kualitatif (DP3APM & Kelurahan)	Sedang	Skor partisipasi bermakna anak per kelurahan
6	Dashboard data terpadu lintas OPD (Diskominfo & DP3APM)	Sedang-Tinggi	Jumlah OPD terintegrasi; frekuensi pemutakhiran data

Catatan: besaran biaya memerlukan kajian penganggaran lebih lanjut oleh DP3APM bersama Bappeda.

REKOMENDASI

Berdasarkan urgensi, feasibilitas, dan ketersediaan sumber daya, DP3APM Kota Bandung direkomendasikan untuk memprioritaskan tiga langkah berikut dalam satu tahun anggaran ke depan:

Meluncurkan sistem deteksi dini putus sekolah berbasis kelurahan terintegrasi dengan bantuan sosial pendidikan, menjangkau keluarga rentan di seluruh 151 kelurahan.

Memperluas layanan konseling psikososial di minimal 30 kecamatan atau kelurahan prioritas guna menekan prevalensi kekerasan psikis.

Menjalankan program afirmasi kepemimpinan bagi 26 organisasi perempuan yang belum aktif, dengan target keterlibatan penuh seluruh organisasi terdaftar pada 2027.

Ketiga langkah ini perlu didukung dashboard data terpadu lintas OPD sebagai instrumen pemantauan capaian secara berkala dan responsif gender. Monitoring dilakukan triwulanan melalui dashboard data terpadu, dengan pelaporan capaian kepada Wali Kota Bandung setiap semester untuk memastikan capaian agregat yang baik benar-benar menjangkau kelompok paling rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alias, A., Mohamad Nasri, N., & Awang, M. M. (2023). A tracer study on child participation in child councillor programmes aimed towards development of the Child Friendly Cities Initiative. *Children*, 10(4), 732.
- [2] Amandaria, R., Darma, R., Tamrin, S., Rahmadanih, R., & Untari, U. (2026). Gender dynamics in local organizations: Enhancing community participation for sustainable rural development in Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10, 1673863.
- [3] Idrus, I. I., Tamrin, S., Amandaria, R., & Wahda, M. A. (2025). Sustainable livelihood approach with gender-social inclusion perspective for child labor prevention in South Sulawesi, Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10, 1619550.
- [4] Kertati, I., & Wahyuningsih, C. D. (2026). Indeks Pembangunan Gender Indonesia: Antara peningkatan angka dan kesenjangan substansial. *Public Service and Governance Journal*, 7(1), 146-159.
- [5] Larashati, L. (2022). Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55-61.
- [6] White, S. J., Sin, J., Sweeney, A., Salisbury, T., Wahlich, C., Montesinos Guevara, C. M., Gillard, S., Brett, E., Allwright, L., Iqbal, N., Khan, A., Perot, C., Marks, J., & Mantovani, N. (2024). Global prevalence and mental health outcomes of intimate partner violence among women: A systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 494-511.
- [7] Yudha, H. P. (2024). Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan anak putus sekolah menengah pertama (SMP). *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1).